

IMPLEMENTASI DYNAMIC WORKING ARRANGEMENT DI DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA BARAT

Rahmat Hidayat

r.h.disbun.jabar@gmail.com

Universitas Winaya Mukti

Abstrak

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Dynamic Working Arrangement Di Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat pasca Covid-19. Metode pengumpulan data digunakan untuk mempelajari literatur dari peraturan, database internal Dinas Perkebunan dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, penelitian penelitian, dan artikel yang ditulis di dalam dan di luar Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat untuk menyusun jurnal ini. Selain itu digunakan kuesioner kepada 44 pegawai. Hasil Kajian menunjukkan bahwa Implementasi Penerapan Dynamic Working Arrangement di Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat mendapatkan respon yang positif, dikarenakan salah satu indikatornya adalah dari segi pekerjaan dan komunikasi baik antara rekan kerja ataupun atasan berjalan dengan baik.

Kata Kunci: *Dynamic Working Arrangement, Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, pasca Covid-19.*

1. PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 belum bisa dikatakan berakhir, namun kehidupan tetap terus berjalan. Masyarakat harus mulai beradaptasi dengan kebiasaan hidup baru, termasuk dalam pola atau budaya kerja baru yang semula Work From Office (WFO) bergeser menjadi Work From Home (WFH). Kerja yang dipaksakan dari rumah tersebut berdampak pada orang-orang yang tidak pernah berkeinginan atau tidak diizinkan bekerja dari rumah karena kebijakan organisasi (Waizenegger et al., 2020). Tetapi memang harus dipaksakan karena bagaimapun juga roda organisasi harus terus berjalan. Organisasi yang beroperasi di lingkungan yang dinamis harus memiliki fleksibilitas sebagai kemampuan dinamis untuk efektif menghadapi perubahan (Mrugalska & Ahmed, 2021, 16–17).

Dampak dari Pandemi Covid-19 sangat berpengaruh pada dunia kerja baik sektor swasta maupun sektor pemerintah. Penerapan WFH berdampak pada pola kerja dan perilaku pegawai pada saat new normal, dimana pegawai sudah mulai terbiasa dengan pola kerja WFH tetapi karena pandemi sudah berakhir sehingga pola kerja kembali pada WFO. Sebagian pegawai perlu melakukan adaptasi kembali ke Pola kerja yang terdahulu. Sehingga untuk dapat mengatasi permasalahan tersebut pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara, pada peraturan baru tersebut salah satunya adalah mengenai Pelaksanaan Tugas Kedinasan secara Fleksibel baik secara Lokasi dan/atau fleksibel secara waktu. Ini secara trend disebut Flexible Work Arrangement (FWA) atau ada yang juga menyebut Work From Anywhere (WFA)

WFA merupakan peningkatan lebih jauh dari pola kerja WFH dengan pengaturan kerja yang fleksibel yaitu mengubah pola bekerja yang memungkinkan aparatur sipil negara untuk memilih waktu bekerja (A. A. Fadhila and L. Wicaksana). Pengaturan kerja yang ada meliputi fleksibilitas penjadwalan jam kerja (flexy time), fleksibilitas jumlah jam kerja (shifting, job sharing), dan fleksibilitas tempat kerja (WFH) (Georgetown). (Kelliher dan Anderson) menjelaskan bahwa implementasi WFA dapat menjadi solusi ke depan untuk meningkatkan kepuasan kerja, komitmen

instansi, work-life balance dan mendorong aparatur sipil negara untuk memberikan performa terbaik. Penerapan WFA/FWA ini dapat mendorong aparatur sipil negara dapat meningkatkan kompetensi dan pengetahuan karena dituntut harus dapat menguasai teknologi terkini.

FWA berhubungan erat dengan sifat tata kelola dinamis yang sedang diterapkan oleh pemerintah Indonesia guna mencapai tata kelola yang baik (Indarti, 2021,146). Istilah "flexy" digunakan untuk merujuk pada fleksibilitas kerja yang memungkinkan penyesuaian jam kerja dengan situasi yang ada, memberikan keleluasaan dalam bekerja (Mungkasa, 2020, 129). Metode FWA memfasilitasi penggunaan media sosial dan alat koneksi virtual lainnya sebagai sarana rutin bagi anggota tim untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan bertukar informasi (Dudija et al., 2023, 186).

Sejalan dengan tata Kelola dinamis yang sedang diterapkan oleh pemerintah Indonesia guna mencapai tata Kelola yang baik, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat secara resmi meluncurkan Mekanisme Kerja Dinamis (MKD) atau yang disebut dengan Dynamic Working Arrangement (DWA) atau Flexible Working Arrangement (FWA) pada tanggal 19 Juni 2023, memungkinkan para pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk bekerja tanpa harus hadir di kantor (jabarprov.go.id, 2023).

Keputusan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memperkenalkan DWA didasarkan pada Peraturan Presiden (PERPRES) No. 21 tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Negeri Sipil. Sebelum dikeluarkannya regulasi ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah merilis Peraturan Daerah No. 102 tahun 2022 tentang Jam Kerja dan Lokasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, yang menandakan pendekatan progresif mereka.

Penerapan (DWA) Dynamic Working Arrangement ini sudah dilakukan uji coba kepada beberapa Empat Organisasi Perangkat Daerah yang dinilai dapat mewakili seluruh perangkat daerah yang ada di Sekretariat Daerah Jawa Barat. Saat ini semua Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah mengimplementasikan sistem kerja DWA, termasuk dalam objek penelitian ini adalah Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat.

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat meluncurkan inisiatif terbaru dalam upaya mengoptimalkan kerja birokrasi: Dynamic Working Arrangement (DWA), juga dikenal sebagai konsep kerja dari mana saja (Work from Anywhere/WFA). Inisiatif ini merupakan respon dari Arahan Presiden yang mendorong birokrasi agar lebih berdampak, lincah, dan responsif. DWA menunjukkan penyesuaian signifikan pada sistem kerja konvensional, sesuai dengan visi transformasi kelembagaan dan digitalisasi yang menjadi prioritas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. DWA memberikan manfaat penting yang mencakup :

1. Peningkatan Produktivitas dan Efisiensi

Fleksibilitas dalam tempat dan waktu kerja yang ditawarkan oleh DWA terbukti meningkatkan produktivitas pegawai. Ini memberi pegawai kebebasan untuk bekerja pada waktu dan tempat di mana mereka merasa paling produktif dan efisien

2. Adaptasi Teknologi Baru

Penerapan DWA mendorong pemanfaatan teknologi baru dalam operasional pemerintah. Sebagai contoh, pada awal implementasi layanan kepegawaian digital, tercatat penghematan 154 ribu lembar kertas berkas persyaratan dan SK. Waktu

pengerjaan dokumen dan berkas persiapan pensiun, kenaikan pangkat, dan kenaikan gaji berkala juga dikurangi hingga 80%, serta efisiensi jumlah SDM hingga 50%

3. Pengurangan Biaya Operasional.

Penghematan anggaran juga menjadi salah satu keuntungan dari implementasi DWA. Misalnya, selama pandemi COVID-19, penerapan kerja dari rumah (Work From Home/WFH) berhasil mengirit 30% anggaran makan dan minum rapat, 90% tagihan air, dan 25% tagihan listrik di beberapa dinas. DWA memberikan potensi penghematan serupa dan membantu alokasi sumber daya yang ada secara lebih efektif.

4. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai

DWA membantu menciptakan keseimbangan kerja-hidup yang lebih baik bagi pegawai, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepuasan kerja dan kesejahteraan pegawai, berkontribusi pada retensi dan motivasi pegawai

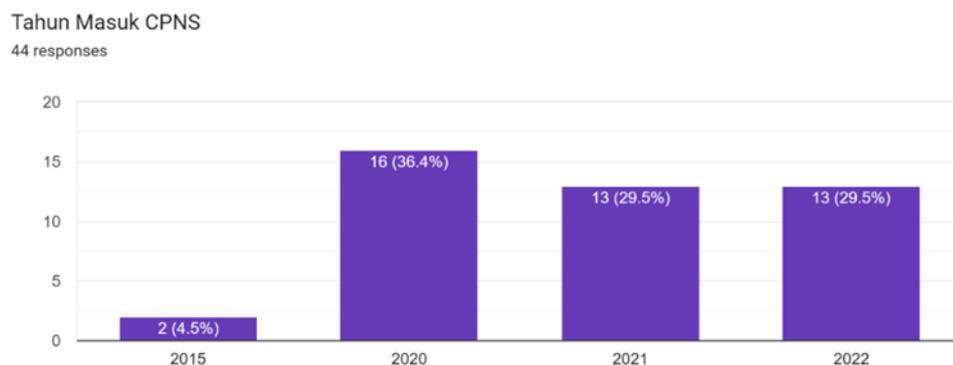
5. Mitigasi Situasi Darurat

Dalam situasi darurat, seperti pandemi COVID-19, DWA memungkinkan pemerintah untuk terus berfungsi secara efektif sementara memastikan keselamatan pegawai. Untuk mendukung pelaksanaan DWA, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menggunakan berbagai sistem teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi yang digunakan salah satunya adalah K-Mob,.

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam pelaksanaan DWA (Dynamic Working Arrangement) ini melewati masa uji coba selama satu bulan yang melibatkan empat Organisasi Perangkat daerah, antara lain Biro Organisasi, Biro Administrasi, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Dinas Komunikasi dan Informatika, setelah Penerapan DWA (Dynamic Working Arrangement) di 4 Organisasi Perangkat Daerah tersebut selanjutnya diimplementasikan kepada semua Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat salah satunya yaitu Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat.

Dinas Perkebunan Jawa Barat melaksanakan Penerapan DWA (Dynamic Working Arrangement) mulai efektif dilaksanakan pada Bulan Juli 2023. Untuk mengetahui Implementasi Penerapan DWA (Dynamic Working Arrangement) dilakukan survey kepada 44 orang Pegawai Perkebunan Provinsi Jawa Barat dengan hasil sebagai Berikut:

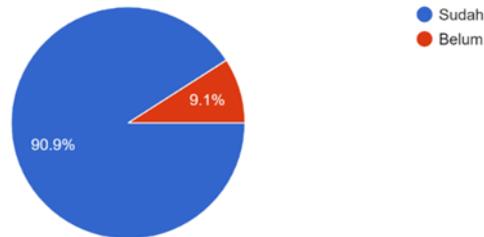
1. Tahun Masuk :



Dari Hasil Survey Pegawai Dinas Perkebunan yang dilakukan survey dengan komposisi tahun masuk 2015 (2), 2020 (16), 2021 (13), 2022 (13) orang.

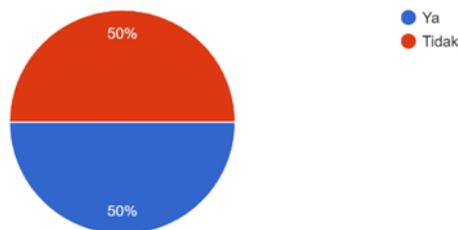
2. Berdasarkan survey 9.1 % merasa bahwa Dynamic Working Arrangement belum diterapkan , hal ini membuktikan bahwa belum pegawai mendapatkan quota Dynamic Working Arrangement

Apakah Di kantor saya sistem Dynamic Working Arrangement sudah diterapkan.
44 responses



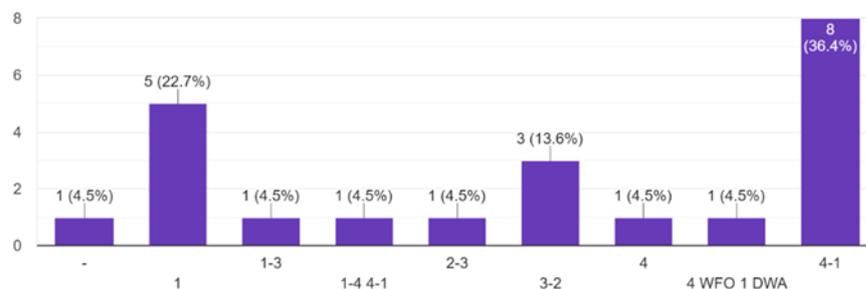
3. Dari 44 orang ternyata hanya 50 % yang pernah mendapatkan quota DWA, dikarenakan pemberian quota berdasarkan pada prestasi, box talent dan tentunya pimpinan yang memberikan kuota kepada setiap pegawai.

Apakah Anda Pernah Mendapatkan skema Dynamic Working Agreements
44 responses



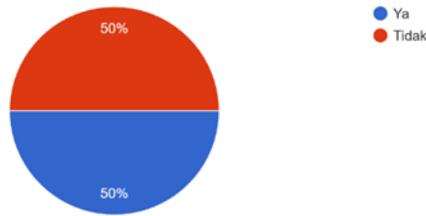
4. Berdasarkan ketentuan skema DWA yaitu : satu hari kerja reguler dengan empat hari fleksibel, dua hari kerja reguler dengan tiga hari fleksibel, tiga hari kerja reguler dengan dua hari fleksibel, dan empat hari kerja reguler dengan satu hari fleksibel. Skema yang terbesar 38,4 % yaitu empat hari kerja reguler dengan satu hari fleksibel.

Skema DWA yang Didapatkan? (4-1, 3-2, dsb)
22 responses



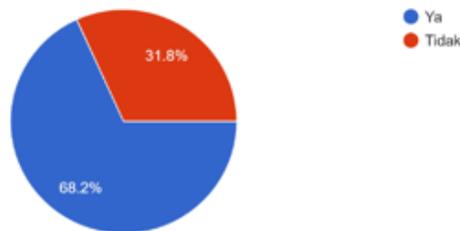
5. Jadi berdasarkan data dibawah, bahwa setiap pegawai Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat tergantung dari kondisi dan situasi pekerjaan pada saat akan mengajukan DWA.

Apakah Anda Selalu Mengajukan DWA setiap minggunya?
22 responses



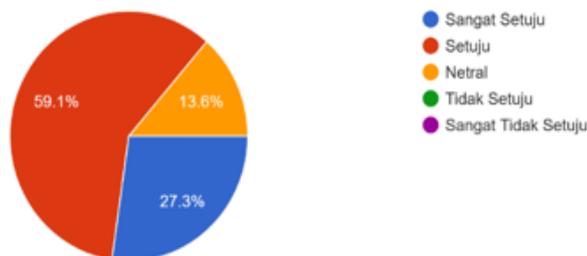
6. Penerapan DWA di Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat berdasarkan ketentuan harus dengan persetujuan atasan masing-masing pegawai dalam hal ini Kepala Bidang atau Kepala Balai. Karena ada sekitar 31.8 % yang menyatakan Atasan tidak selalu menyetujui pengajuan DWA.

Setiap Kali Anda Mengajukan DWA apakah Selalu Disetujui Atasan?
22 responses



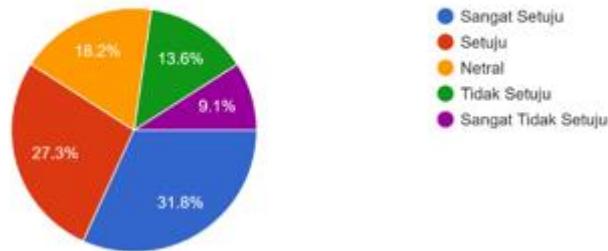
7. Pegawai Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat pada saat implementasi DWA sebanyak 59,1 % menyatakan bahwa Atasan memberikan arahan jelas pada saat pegawai melaksanakan DWA.

Pada Saat Dynamic Working Arrangement Apakah Atasan Anda Memberikan Pekerjaan Yang jelas?
22 responses



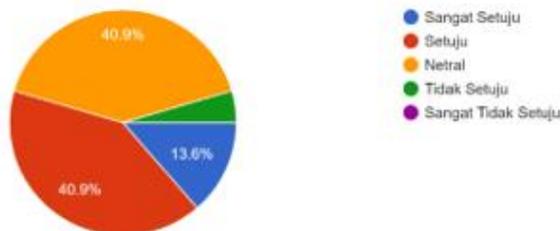
8. Dalam Hal Pemberian kuota masih ada 13,6 % menyatakan tidak setuju dan 9,1 Persen menyatakan sangat tidak setuju hal ini dikarenakan tidak dijelaskan secara rinci dan kurang terbuka mengenai pemberian kuota kepada setiap pegawai.

Apakah Kebijakan pemberian kuota Dynamic Working Arrangement sudah cukup Jelas?
22 responses



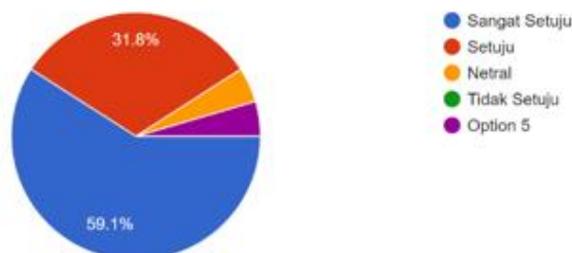
9. Dari Hasil data dibawah kita bisa melihat bahwa 40,9 persen netral mengenai ketepatan pimpinan dalam pemberian kuota DWA di dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat.

Menurut Anda Apakah Pegawai yang mendapatkan kuota Dynamic Working Arrangement diberikan kepada pegawai yang tepat?
22 responses



10. Untuk masalah komunikasi mencapai angka 90%, dikarenakan di era Teknologi informasi ini dipastikan untuk urusan komunikasi tidak ada kendala yang signifikan.

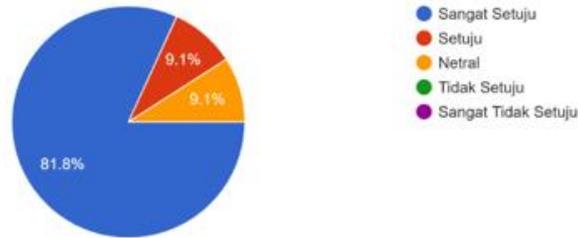
Pada Saat Dynamic Working Arrangement Apakah Komunikasi Anda dengan Atasan dan Rekan Kerja Berjalan Lancar?
22 responses



11. Penggunaan Aplikasi K-Mob untuk Perekaman Kehadiran Pegawai Seluler sangat bermanfaat selain untuk absensi harian juga untuk pengajuan DWA.

Pada Saat Dynamic Working Arrangement Apakah Proses Absensi pada aplikasi K-Mob cukup mudah dilakukan oleh Anda?

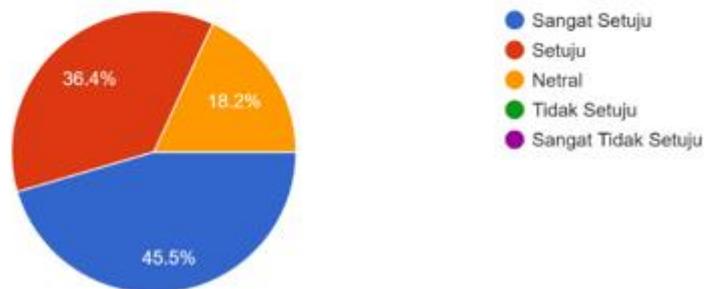
22 responses



12. Pada saat penerapan DWA para pegawai merasakan ada pengaruh baik pada saat pencapaian target pekerjaan yang dilaksanakan.

Penerapan Dynamic Working Arrangement berpengaruh baik pada Pencapaian Target Kerja Yang saya Kerjakan ?

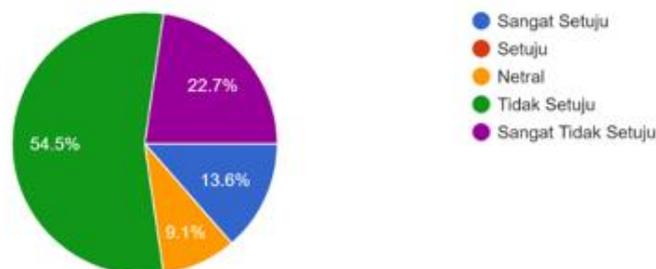
22 responses



13. Para Pegawai Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Angkatan 2015 – 2022 merasa tidak ada kendala dalam pelaksanaan DWA karena sudah paham dalam penggunaan teknologi informasi terbaru.

Pada Saat pelaksanaan Dynamic Working Arrangement, Apakah Anda mengalami kendala dalam penyelesaian tugas pekerjaan ?

22 responses



Terkait aplikasi yang digunakan untuk sistem DWA, seperti TRK (Aplikasi Manajemen Kinerja) dan K-Mob (Perekam Absensi Pegawai Seluler), aplikasi tersebut sudah direkomendasikan oleh Kementerian PAN dan RB melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat. Selanjutnya, uji keamanan rutin dilakukan bekerja sama dengan Badan Siber dan Kripto untuk memastikan perlindungan data dan privasi pengguna. Menariknya, aplikasi ini tidak eksklusif milik Pemprov Jabar, tetapi bisa dimanfaatkan oleh pemerintah daerah lain yang mungkin ingin menerapkan strategi serupa.

Ketentuan DWA berdasarkan ketentuan Ini mencakup: satu hari kerja reguler dengan empat hari fleksibel, dua hari kerja reguler dengan tiga hari fleksibel, tiga hari kerja reguler dengan dua hari fleksibel, dan empat hari kerja reguler dengan satu hari fleksibel. Pemilihan karyawan untuk DWA ada di tangan Posisi Kepemimpinan Tinggi / Pemimpin Aparatur Daerah untuk setiap karyawan, tergantung pada kondisi dan administrasi di setiap Aparatur Daerah.

3. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Dynamic Working Arrangement di Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dari hasil survey menjelaskan bahwa Belum semua Pegawai Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Mendapatkan quota untuk pelaksanaan DWA. Secara garis besar para pegawai merasakan efek positif dari pelaksanaan DWA ini produktifitas karyawan ditentukan oleh seberapa baik kondisi mereka saat melakukan pekerjaan dari rumah tentunya harus diselesaikan dengan; Jenis pekerjaan, ketersediaan teknologi, kesehatan mental, dan preferensi individu menentukan kenyamanan dan produktivitas bekerja dari rumah. Yang berarti, bekerja dari rumah secara efektif tidak berlaku untuk semua pekerja atau semua jenis pekerjaan. tetapi, untuk orang yang tepat, bekerja dari rumah dapat meningkatkan produktivitas. Mereka yang bekerja dalam bidang tertentu seperti teknologi informasi, penelitian dan pengembangan, dan bidang lain yang memerlukan waktu yang lama dan detail, seperti penelitian dan pengembangan, akan cenderung cocok untuk bekerja dari rumah karena mereka dapat menghemat waktu yang seharusnya digunakan untuk perjalanan ke kantor menjadi waktu kerja yang efektif dan efisien, selain dapat menghindari gangguan-gangguan lain yang dapat menghambat pekerjaan mereka. Bagi Organisasi Perangkat Daerah, mengizinkan pegawainya bekerja dari rumah juga memberikan keuntungan dalam jangka pendek dan jangka panjang. OPD dapat menghemat biaya operasional.

Monitoring dan evaluasi berkala harus dilakukan untuk memastikan bahwa Dynamic Working Arrangement sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat. DWA dapat dilakukan selama memenuhi komitmen karena itu adalah hak pegawai sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Selain itu, lokasi Dynamic Working Arrangement harus sesuai dengan norma dan kode etik PNS dan mempertimbangkan aspek keadilan untuk melindungi pegawai yang jenis pekerjaannya tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Waizenegger, L., McKenna, B., Cai, W., & Bendz, T. (2020). An affordance perspective of team collaboration and enforced working from home during COVID-19. *European Journal of Information Systems*, 29(4), 429–442
- A. A. Fadhila and L. Wicaksana, "Sistematik Review : Fleksibel Working Arrangement (FWA) Sebagai Paradigma Baru Asn Di Tengah Pandemi Systematic Review : Flexible Working Arrangement (FWA) As A New Paradigm Of Civil Servant During Pandemic Covid-19," *Spirit Publik*, vol. 15, no. 2, pp. 111–130, 2020
- Georgetown, "Flexible Work Arrangements: A Definition and Examples," *Georg. Univ. Law Cent.*, pp. 1–4, 2006.
- F. Simanjuntak, D. M. Mustika, and B. Sjabadhyni, "Pengaruh Flexible Work Arrangement Terhadap Ethical Decision Making : Peran Employee Engagemen Sebagai Mediator," vol. 5, no. 1, 2000

- Jabarprov.go.id. (2023, June 20). Adaptasi Sistem Kerja Berbasis Digital, Pemprov Jabar Terapkan Mekanisme Kerja Dinamis.<https://jabarprov.go.id/berita/adaptasi-sistem-kerja-berbasis-digital-pemprovjabar-terapkan-mekanisme-kerja-dinamis-9457>
- :<https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-017020930/dynamic-working-arrangement-inovasi-pemprov-jawa-barat-dalam-meningkatkan-produktivitas-dan-efisiensi-kerja?page=all>
- Fadhila, A. A., & Wicaksana, L. (2020). Sistemik Review: Fleksibel Working Arrangement (FWA) Sebagai Paradigma Baru Asn Di Tengah Pandemi Systematic Review : Flexible Working Arrangement (FWA) As A New Paradigm Of Civil Servant During Pandemic Covid-19. 15, 111–130.